

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

STUDI KASUS

**Oleh :
Jajang Nurhidayatuloh**

**NPM :
41151010130122**

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

**Di bawah Bimbingan :
Ai Marliah, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jajang Nurhidayatuloh
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130122
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus
Judul Penulisan Tugas Akhir : STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA NOMOR
03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.J
KT.PST BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Jajang Nurhidayatuloh
NPM. 41151010130122

ABSTRAK

Dampak dari suatu perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu perusahaan dalam rangka operasionalnya untuk pengeluaran pembayaran kewajiban gaji kepada pekerja pastinya akan mengalami masalah juga dan cenderung tidak bisa membayar kewajiban tersebut, berdasarkan hal tersebut yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor kepailitan dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundanaan Kewajiban Pembayaran Utang ? serta bagaimanakah perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam perusahaan pailit ?

Dalam pembahasan studi kasus ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum kepailitan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap para kreditor yang menyetujui rencana perdamaian antara PT. Indo Energi Alam Resources dengan para kreditor sangat lemah, karena tidak terdapat aturan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum terhadap para kreditor dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya upah buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya tetapi tidak jelas diatur utang yang lainnya ini utang yang mana dan bagaimana proses penyelesaiannya. Sementara dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan hal yang sama yaitu Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara jelas dan gamblang menekankan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan hidup dan keluarganya.

ABSTRACT

The impact of a company that declared bankruptcy is the company in the framework of its operation for the expenditure of payment of salary obligations to workers will certainly experience problems and tend not to be able to pay these obligations, based on it interesting to examine is how the legal protection against bankruptcy creditors associated with Court Decision Commerce No. 03 / PDT.SUS / PAILIT / 2015 / PN.NIAGA.JKT.PST ratified Law Number 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy and Prohibition of Obligation of Debt Payment? and how does the protection of labor rights in a bankrupt company?

In the discussion of this case study the author uses normative juridical research method that aims to find the principles and foundations of positive legal philosophy, and find the law in-concreto. The specification of this study is descriptive analytical, that is not only describe the problem alone, but also analyze through rules that apply in bankruptcy law. Data collection techniques were conducted through literature study to obtain secondary data and field research to collect primary data.

The results concluded that the legal protection of creditors who approved the peace plan between PT. Indo Energi Alam Resources with its creditors is very weak, as there are no rules that strictly regulate the legal protection of creditors in Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations in case of peace between both parties. Law Number 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Payment Obligations Labor-wage debts for the time before and after bankruptcy include the debt of bankruptcy means that the wages of workers must be paid in advance of other debts but not clearly regulated other debt this debt which and how the settlement process. While in Act No. 13 of 2003 on Manpower also states the same thing, namely Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 Year 2003 on Manpower, clearly and explicitly emphasizes that wages and other rights of workers are debt that precedes its payment to protect and ensure its survival and family.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat studi kasus yang berjudul : STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Ai Marliah, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada papa dan mama yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan
mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman :

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	9
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.....	11
A. Masalah Hukum	11
B. Tinjauan Teoritik	11
1. Pengertian Perusahaan.....	11
2. Pengertian Hukum Kepailitan	25
3. Syarat Pengajuan Pailit	35
4. Pembagian Harta Pailit.....	43
5. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	46
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM.....	53
A. Ringkasan Putusan	53
B. Pertimbangan hukum.....	54
BAB IV ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN (PAILIT) TERHADAP PEMBAYARAN KERJA	58

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kepailitan Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundanaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	58
B. Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perusahaan Pailit	64
BAB V KESIMPULAN	70
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	